

## HARMONI MASYARAKAT DI DESA BALUN, KECAMATAN TURI, KABUPATEN LAMONGAN PASCA TRANSFORMASI RELIGI SEBAGAI DAMPAK PERISTIWA G30S PKI MASA ORDE BARU

**Vikky Nur Vaisyal**

Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: [vikkynurv@gmail.com](mailto:vikkynurv@gmail.com)

**Riyadi**

S1 Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: [riyadiriyadi@unesa.ac.id](mailto:riyadiriyadi@unesa.ac.id)

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menganalisis komposisi agama/kepercayaan penduduk Desa Balun pada masa Orde Baru, 2) Menganalisis proses terwujudnya kerukunan umat beragama di Desa Balun masa Orde Baru, dan 3) Menganalisis peran pemerintah terhadap terbentuknya dan menjaga kerukunan umat beragama di Desa Balun Masa Orde Baru. Sumber yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan peneliti berupa hasil wawancara langsung dari pelaku sejarah pada tahun yang dibutuhkan, data statistik yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia dan arsip Desa Balun yang berupa data – data jumlah pemeluk agama, data kondisi geografis dan data monografi Desa Balun dengan data tersebut dapat menjadi acuan peneliti untuk menganalisis perkembangan jumlah pemeluk agama-agama di Desa Balun. Kemudian sumber sekunder yang digunakan peneliti berupa buku dan jurnal hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Religi dan perkembangannya pada masa Orde Baru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi demografi, mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam sebanyak 65% agama Kristen sebanyak 25% dan agama hindu sebanyak 10% dari rata-rata total penduduk pada masa Orde Baru. Jumlah pemeluk agama di Desa Balun mengalami perubahan tiap tahun di karena kan faktor perkawinan, kematian dan perpindahan penduduk. Kerukunan antar umat beragama di Desa Balun ditandai peristiwa pasca peristiwa G30SPKI yakni dampak dari peraturan pemerintah pada waktu itu yang mengharuskan masyarakat Indonesia untuk memeluk agama resmi yang diakui pemerintah yang mengakibatkan gelombang transformasi agama secara besar-besaran. Upaya pemerintah untuk mewujudkan serta menjaga keharmonisan di Desa Balun antara lain adalah penerapan program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan mengadakan kesepakatan oleh seluruh tokoh agama dan warga Desa Balun untuk selalu menjaga kerukunan antar masyarakat beragama di Desa Balun. Proses penerapan program-program tersebut dapat menjaga kerukunan beragama Desa Balun yang dibuktikan dengan tidak adanya permasalahan terkait kerukunan umat beragama.

**Kata Kunci:** Kerukunan, Agama, Desa Balun

### Abstrac

*The objectives of this study are: 1) To analyze the religious composition / belief of the Balun villagers during the New Order era, 2) To analyze the process of creating religious harmony in Balun Village during the New Order era, and 3) To analyze the role of the government in the formation and maintenance of religious harmony in the Village Balun during the New Order. The sources used are divided into two, namely primary sources and secondary sources. The primary sources used by researchers were the results of direct interviews from historical actors in the required year, statistical data obtained from the Indonesian Central Bureau of Statistics and Balun Village archives in the form of data on the number of religious followers, geographic conditions data and Balun Village monograph data with these data. can be a reference for researchers to analyze the development of the number of followers of religions in Balun Village. Then the secondary sources used by researchers are books and journals from previous research related to Religion and its development during the New Order era. The results of this study indicate that the demographic composition, the majority of people embracing Islam as much as 65% Christianity as much as 25% and Hinduism as much as 10% of the average total population during the New Order era. The number of religious believers in Balun Village changes every year due to factors of marriage, death and population movements. The harmony between religious communities in Balun Village was marked by the events following the G30SPKI incident, namely the impact of government regulations at that time which required Indonesians to embrace an official religion that was recognized by the government which resulted in a massive wave of religious transformation. The government's efforts to create and maintain harmony in Balun Village include the implementation of the Pancasila Cultivation and Practice Guidelines (P4) program and making agreements by all religious leaders and residents of Balun Village to always maintain harmony between religious communities in*

*Balun Village. The process of implementing these programs can maintain religious harmony in Balun Village as evidenced by the absence of problems related to religious harmony.*

**Keyword:** Harmony, Religion, Balun Village

## PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang memiliki keragaman suku, budaya, bahasa dan agama, hal tersebut merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima sebagai kekayaan bangsa. Dengan keberagaman tersebut apabila tidak di pelihara dengan baik bisa menimbulkan konflik-konflik kepentingan antar kelompok umat beragama dalam masyarakat. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Pemerintah senantiasa memprakarsai berbagai kegiatan untuk mengatasi ketegangan dalam kehidupan beragama di Indonesia, agar kerukunan hidup beragama selalu dapat tercipta, demi persatuan dan kesatuan bangsa serta pembangunan. Menurut Menteri Agama, K.H. M. Dachlan, pada pidato pembukaan Musyawarah Antar Agama tanggal 30 Nopember 1967 menyatakan bahwa adanya kerukunan antara golongan beragama adalah merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya stabilitas politik dan ekonomi yang menjadi program Kabinet AMPERA. Oleh karena itu, kami mengharapkan sungguh adanya kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat beragama untuk menciptakan iklim kerukunan beragama ini, sehingga tuntutan hati nurani rakyat dan cita-cita kita bersama ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang dilindungi Tuhan Yang Maha Esa itu benar-benar dapat berwujud.<sup>1</sup> Dari pidato K.H. M. Dachlan tersebutlah istilah “Kerukunan Hidup Beragama” mulai muncul dan kemudian menjadi istilah baku dalam berbagai dokumen negara dan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Adapun regulasi pemerintah terhadap kerukunan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 BAB XI Pasal 29 ayat 2 yang mengatur tentang agama yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.” Jadi, berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara dapat mewujudkan terciptanya kerukunan dalam hidup bermasyarakat dengan memiliki kewenangan untuk memeluk agama dan beribadat menurut kepercayaannya masing-masing. Meskipun sudah sejak lama istilah kerukunan antar umat beragama ini telah di kemukakan namun pada realitanya permasalahan akan kerukunan antar umat beragama ini masih sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman berkaitan dengan toleransi semakin berkurang<sup>3</sup>, salah satunya terjadi pada kasus penolakan pembangunan pura yang terjadi di di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi pada

hari Sabtu 4 Mei 2019, karena sebagian masyarakat menganggap agama Hindu hanya minoritas di desa tersebut.<sup>4</sup> Contoh lain kasus pembubaran secara paksa kegiatan bakti sosial jemaat gereja santo Paulus di Jogja, sejumlah massa mengatasnamakan diri mereka Front Jihad Islam (FJI) dan beberapa ormas lainnya, membubarkan secara paksa acara bakti sosial yang digelar Gereja Katolik Santo Paulus Pringgolayan, Bantul, Yogyakarta, karena dianggap upaya kristenisasi<sup>5</sup>. Kasus intoleransi yang terjadi tersebut dapat merusak keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama

Pasca G 30S PKI pada pertengahan tahun 1967, Kristen dan Hindu mulai masuk dan berkembang di Desa Balun. Berawal dari adanya pembersihan terhadap orang-orang yang terlibat dengan PKI termasuk para pamong desa diduga yang terlibat. Hal ini mengakibatkan adanya kekosongan kepala desa dan perangkat desa.<sup>6</sup> Selain itu kebijakan pemerintah pasca G 30S PKI mengharuskan setiap warga negara Indonesia memeluk agama resmi yang di akui pemerintah hal ini berlaku pada 1966 melalui Ketetapan MPRS No XXVII/1966, yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia harus memeluk salah satu dari lima agama yang resmi diakui oleh negara dan pemerintah Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu & Budha. Akibat kekosongan jabatan pemerintah di Desa Balun maka untuk dapat menjalankan pemerintahan desa ditunjuk lah seorang prajurit TNI yang bernama Pak Batih yang beragama Kristen. Pada tahun yang sama mulai masuk agama Hindu ke Desa Balun. Kristen dan Hindu merupakan agama pendatang yang dalam perkembangan juga akibat dampak dari peraturan pemerintah pasca G30S PKI tahun 1998 tentang aturan memeluk agama resmi, sampai akhirnya masyarakat Desa Balun dapat menerima dengan baik sehingga desa balun memiliki kerukunan antar umat beragama yang sangat baik terlihat dari sikap masyarakat desa balun yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama nya, kerukunan antar umat beragama di Desa Balun terjaga hingga saat ini dan belum pernah terjadi adanya gesekan ataupun konflik antar pemeluknya.

Adanya beberapa agama dalam suatu wilayah memungkinkan terjadinya gesekan sosial antara pemeluknya, hal ini paling banyak terjadi karena etnosentrisme, fanatisme sempit, kecemburuan sosial ataupun pertentangan antar budaya dalam masyarakatnya. Hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di Desa Balun masuknya agama-agama tidak menjadi sebuah persoalan yang menyebabkan gesekan antara masyarakatnya, proses

<sup>1</sup> Ibnu Rusydi & Siti Zolehah, ‘Makna Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Konteks Keislaman dan Keindonesian ‘(2018) al-Afkar, Journal for Islamic Studies.

<sup>2</sup> *ibid.*

<sup>3</sup> M Thoriqul Huda, “Potret Kerukunan Pemuda Lintas Agama Di Jawa Timur,” in PROCEEDINGS: Annual Conference for Muslim Scholars, 2018, 929–36.

<sup>4</sup> “Duduk Perkara Penolakan Pembangunan Pura di Bekasi “dalam *tirto.id*, 16 Mei 2019

<sup>5</sup> “Sejumlah Ormas Melarang Bakti Sosial Gereja Santo Paulus Yogya “dalam *Nasional Tempo*, 30 Januari 2018

<sup>6</sup> Sejarah balun diakses dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Balun,Turi,Lamongan> Pada 15 Mei 2020 pukul 20.00 WIB

penyebaran agama di Desa Balun terjadi secara damai dan sikap toleransi antar masyarakatnya terjaga hingga sekarang. Desa Balun mendapat julukan Desa Pancasila merupakan salah satu desa yang sampai saat ini masih banyak melestarikan budaya-budaya leluhurnya.<sup>7</sup> Sebutan sebagai desa pancasila ini merupakan wujud kerukunan antar umat beragama yang dan sikap toleransi tinggi yang menjadi ciri khas sosial masyarakat di Desa Balun.

Proses masuknya agama-agama di Desa Balun terjadi secara damai tanpa ada penolakan atau gesekan dari masyarakat setempat, hal tersebut terjadi dikarenakan kondisi masyarakat yang memiliki toleransi antara umat beragama sangat tinggi, selain itu peran pemerintah dan tokoh masyarakat juga di butuhkan untuk menjaga kerukunan dan toleransi di Desa Balun. Desa Balun mendapat julukan Desa Pancasila pada tahun 1990-an saat gencarnya penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Desa Balun menjadi contoh untuk pelaksanaan program pemerintah saat itu. Desa Balun memiliki ciri khas dan keunikan yang berbeda dari desa – desa lainnya. Desa Balun menjadi daerah permukiman dengan warganya yang memiliki perbedaan agama namun dapat hidup berdampingan tanpa adanya gesekan karena agama sekalipun dari awal masuknya agama-agama lain sampai hingga dengan sekarang, keunikan yang paling menonjol dan dapat dilihat secara langsung, yaitu letak tempat ibadah masing – masing agama yang berada dalam satu komplek. Letak Masjid yang berada tepat di samping bagian depan Gereja. Sementara letak Pura berada tepat di sebelah kiri Masjid. Kegiatan-kegiatan keagamaan di Desa Balun juga selalu melibatkan tokoh-tokoh dan pemuda agama lain, selain itu bentuk-bentuk toleransi terlihat dari keluarga-keluarga beda agama di Desa Balun.

Berdasarkan pada permasalahan dan keunikan yang ada di Desa Balun, tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah bahwasanya kerukunan antar umat beragama sejatinya dapat di raih hal ini terlihat pada kehidupan masyarakat Desa Balun sebagai contoh konkrit nya. Mengingat kerukunan umat beragama di Desa Balun sendiri terjadi karena adanya sebuah proses pada masa Orde Baru. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komposisi agama/kepercayaan penduduk Desa Balun pada masa Orde Baru?
2. Bagaimana proses terwujudnya kerukunan umat beragama di Desa Balun pada Masa Orde Baru?
3. Bagaimana peran pemerintah terhadap terbentuknya dan menjaga kerukunan umat beragama di Desa Balun pada masa Orde Baru?

Urgensi penelitian ini didasari pada fakta dimana masa kini kerukunan umat beragama kerap kali terabaikan, Peneliti ingin menampilkan proses kerukunan umat beragama di Desa Balun pada masa Orde Baru sebagai wujud refleksi bagi kehidupan di masa kini dimana intoleransi masih kerap terjadi, yang mana sejarah sendiri memiliki fungsi sebagai guru kehidupan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian sejarah merupakan seperangkat prinsip atau tahap-tahap mutlak yang harus dilakukan dalam penulisan sejarah.<sup>8</sup> Penelitian ini menggunakan metode penulisan sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi<sup>9</sup>

### 1. Heuristik

Tahap pertama Heuristik pada tahapan ini peneliti telah melakukan pencarian sumber-sumber yang relevan dengan topik yang dibahas sebagai penunjang penelitian ini. Untuk sumber primer peneliti telah melakukan observasi ke lapangan dengan melakukan wawancara kepada bapak Nasekan selaku pelaku sejarah dan tokoh agama Kristen, bapak Titis selaku tokoh agama Islam, bapak Tadi selaku tokoh agama Hindu dan, Peneliti juga telah mencari dokumentasi dengan menggunakan dokumen-dokumen yang terdapat di Badan Pusat Statistik Indonesia yang berisi tentang jumlah kondisi demografis desa balun dari tahun 1987-1998 serta dokumen-dokumen arsip Desa Balun yang berupa leaflet Mbah Alun dan buku tentang Gereja Balun.

Sumber sekunder Peneliti mendapatkan beberapa sumber terkait bahasan yang diambil dari beberapa sumber tertulis berupa buku, jurnal, skripsi yang membahas tentang kerukunan dan keagamaan di Desa Balun yakni *Toleransi Dan Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Keluarga: Studi kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, 2018 Jurnal* dan Jurnal pendukung seperti *Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat di Era Globalisasi* yang peneliti dapatkan di Perpustakaan Daerah Lamongan dan website jurnal mahasiswa.unesa.ac.id

### 2. Kritik

Tahap kedua Kritik sumber terdiri dari kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern dilakukan untuk menguji keaslian, keotentikan, dan relevansi terhadap topik yang dibahas. Sedangkan kritik intern yaitu pengujian terhadap isi dan kandungan sumber sejarah<sup>10</sup>. Peneliti melakukan kritik ekstern terhadap sumber sekunder seperti karya ilmiah, skripsi, buku, dokumen-dokumen dari Badan pusat Statistik Indonesia, di sini peneliti melakukan penilaian

<sup>7</sup> Profil Desa Balun diakses dari <http://lamongankab.go.id/instansi/turi/2013/10/16/profil-desai/> diakses pada 15 Mei 2020 pukul 20.00 WIB

<sup>8</sup> Aminuddin Kasdi, *Memahami Sejarah*, (Surabaya: UNESA University Press, 2005), hlm. 10.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

dan mencari kecocokan terhadap sumber tersebut sebagai pendukung untuk dijadikan sumber penelitian. Peneliti juga melakukan kritik intern pada sumber sejarah yang peneliti dapat dari hasil wawancara untuk memastikan keotentikan dan kebenaran isi wawancara tersebut sesuai fakta yang terjadi. Peneliti juga mencocokkan antara laporan dari buku, arsip dengan hasil wawancara yang di dapat, agar tercipta sebuah fakta sejarah yang berkaitan antara sumber satu dengan sumber yang lainnya.

### 3. Interpretasi

Tahap ketiga Interpretasi, Dalam hal ini peneliti telah mencari dan menghubungkan berbagai fakta dan sumber lalu disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan menjadi rekonstruksi fakta sejarah. Peneliti dapat menafsirkan penyebab masuk, perpindahan serta proses kerukunan agama yang terwujud di desa balun berkaitan dengan kondisi pasca peristiwa G30S PKI tahun 1995, hal ini terlihat dari hasil wawancara dan adanya peraturan

Tahun	Islam	Kristen	Hindu	Jumlah Pemeluk
1987	3.000	840	253	4.083 Jiwa
1994	2.933	1.050	410	4.381 Jiwa
1995	2.855	1.118	420	4.093 Jiwa
1996	2.849	1.112	420	4.381 Jiwa
1998	3.164	1.002	241	4.407 Jiwa

pemerintah terkait agama resmi pada waktu itu.

### 4. Historiografi

Tahap terakhir Historiografi Pada tahap ini fakta yang telah diperoleh dan diinterpretasikan kemudian dituliskan sebagai kisah atau cerita sejarah secara kronologis. Peneliti telah melakukan proses penulisan yang didapat dari fakta maupun sumber sejarah yang telah didapat dan menyusunnya dalam sebuah penelitian yang berjudul "Harmoni Masyarakat Di Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan Pasca Transformasi Religi Sebagai Dampak Peristiwa G30s PKI Pada Masa Orde Baru". Dalam tulisan tersebut peneliti mengupas tentang Kondisi Geografis dan Demografis Desa Balun pada masa Orde Baru, Kondisi Desa Balun sebelum Masa Orde Baru, perkembangan masuknya agama Islam, Kristen, dan Hindu di Desa Balun serta peran pemerintah dalam upaya mewujudkan dan menjaga kerukunan umat beragama di Desa Balun pada masa Orde Baru.

## PEMBAHASAN

### A. Kondisi Geografi dan Demografi Desa Balun pada masa Orde Baru

Desa Balun merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Secara

geografis memiliki luas 621.103 Ha. kondisi wilayah balun merupakan daerah agraris sehingga sebagian mayoritas mata pencaharian masyarakat desa balun adalah petani namun sebagian masyarakat desa balun juga memiliki tambak-tambak yang digunakan untuk beternak ikan bandeng yang nantinya akan di salurkan/di pasarkan ke berbagai daerah seperti gersik dan brondong. Kondisi tanah yang subur di Desa Balun sehingga bisa di tanami berbagai tanaman pokok penunjang kebutuhan hidup 621.103 Ha.

Desa Balun memiliki masyarakat yang majemuk dengan tiga agama yang hidup rukun berdampingan di dalamnya yaitu Islam Kristen dan Hindu, Desa Balun mendapat julukan desa pancasila atau miniatur indonesia hal ini dikarenakan ada keunikan di desa balun yang di dalam kehidupan masyarakatnya terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup rukun berdampingan , keunikan tersebut bisa dilihat dari kehidupan masyarakat di desa balun ketika ada sebuah kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan masyarakat balun saling membantu dalam proses berjalannya sebuah kegiatan keagamaan, selain itu bisa di lihat dari tempat peribadatan keagamaan yang letaknya berdekatan . Wujud sikap toleransi ini masuk dalam kekeluargaan dimana dalam satu keluarga memeluk agama berbeda merupakan suatu hal yang wajar di Desa Balun.

**Tabel 2.1** Jumlah Pemeluk Agama Desa Balun Tahun 1987-1998

(Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, Kecamatan Turi, Tahun 1987-1998.)

Berdasarkan tabel di atas agama Islam di Desa Balun menjadi mayoritas sebagian masyarakatnya, Jumlah pemeluk agama desa balu terus berubah hal ini dikarenakan adanya pernikahan dan hal-hal yang lain yang mengharuskan perpindahan antar agama pada masyarakat di Desa Balun.

### B. Kondisi Desa Balun Sebelum Masa Orde Baru

Sebelum masuknya agama Kristen dan Hindu pada tahun 1966-1977 Desa Balun merupakan desa yang secara umum mayoritas penduduknya merupakan petani dan mayoritas penduduknya merupakan pemeluk agama Islam namun juga memiliki kepercayaan Kejawen, mayoritas penduduk agama Kejawen di desa balun di merupakan hasil upaya mbah alun yang pada waktu itu yang mengajarkan agama Islam di desa tersebut. Masyarakat desa balun menjalani kehidupannya dengan normal sebelum organisasi PKI masuk dan menyebar di Desa Balun. Desa balun pada waktu itu mendapat cap PKI dari orang luar karena suburnya organisasi dan gerakan PKI di Desa Balun, menurut bapak Nasekan ada sekitar 700 KK mengikuti yang bergabung menjadi anggota ataupun sekedar ikut-ikutan pada waktu itu, PKI membentuk organisasi-organisasi seperti BTI dan Gerwani<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> Wawancara, Bapak Naskan, Tanggal 25 Oktober 2020, Mantan Ketua Majelis Jemaat GKJW Pevanthen Balun

Pada tahun 1965 terjadi penumpasan PKI secara besar-besaran yang mengakibatkan kepala desa, perangkat desa dan sekitar 30 orang diangkut dan beberapa orang hilang tanpa di ketahui, tahun 1965 merupakan kondisi yang mencekam di desa balun, masyarakat desa balun merasa tertekan dan takut untuk melakukan aktivitas sehari-hari karena hampir setiap hari ada saja warga desa balun yang hilang, berita terjadinya kekacauan di Desa Balun terdengar oleh bapak Bathi yang pada waktu itu merupakan anggota TNI Kodim 0812 dan salah satu keluarganya juga ikut hilang dalam peristiwa penumpasan PKI mengharuskan bapak Bathi untuk kembali ke Desa Balun dalam upaya untuk mengamankan dan menjaga situasi desa Balun, pada tahun 1966 bapak Bathi mengikuti pemilihan desa karena terjadinya kekosongan pemerintahan desa waktu itu. Terpilihnya bapak Bathi sebagai kepala desa balun pada tahun 1966 menjadi awal terwujudnya kerukunan keagamaan di Desa Balun.

### C. Proses Terwujudnya Kerukunan Umat Beragama di Desa Balun Pada Masa Orde Baru

Proses terwujudnya harmonisasi di desa balun dimulai ketika tahun 1966 pasca peristiwa G30S yang mengakibatkan terjadinya kekosongan pemerintahan desa karena dianggap sebagai anggota dari PKI. Untuk menekan kekuatan PKI, Orde Baru pada tahun 1966 menyatakan bahwa ateisme dilarang dan pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa setiap warga Indonesia harus memeluk salah satu dari lima agama yang diakui oleh pemerintah<sup>12</sup>. Menurut penuturan bapak Naskan kepala desa balun pasca peristiwa G30S yaitu bapak Bathi menghimbau warga agar memeluk agama resmi yang diakui pemerintah pada saat itu melihat karena sebagian masyarakat balun masih menganut kepercayaan Kejawan seperti (Sapto Dharmo), agama-agama yang diakui pemerintah pada saat itu yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha.<sup>13</sup> Dengan adanya peraturan tersebut mengakibatkan sebagian warga desa balun berpindah kepercayaan dan terbentuknya kerukunan pun dimulai, kerukunan di Desa Balun tidak terlepas dari peran tokoh dan masyarakat itu sendiri, masuknya agama-agama di desa balun menjadi hal penting dalam terwujudnya kerukunan tersebut terlebih pemeluk-pemeluk agama tersebut masih terikat hubungan kekeluargaan, dimana banyak dalam sebuah keluarga yang individunya memeluk agama berbeda serta peran tokoh-tokoh agama sejak dulu berusaha dalam menjaga kerukunan, berikut proses masuk dan berkembangnya agama-agama yang ada di desa balun.

#### 1. Masuk Dan Berkembangnya Agama Islam di Desa Balun

Agama Islam di desa balun sudah ada sejak nenek moyang ketika proses penyebaran terjadi pada zaman

Walisongo, tokoh Mbah Alun di kenal sebagai orang pertama yang mengajarkan agama Islam di Desa Balun pada saat Mbah Alun bersembunyi di Desa Balun dan menyebarkan agama Islam di Desa Balun. Dalam leaflet yang ditulis oleh Drs. H. Achmad Chambali dan diterbitkan oleh desa balun, diceritakan bahwa Mbah Alun lahir di Lumajang pada tahun 1574 dan beliau merupakan anak dari Minak Lumpat yang dalam Babad Sembar merupakan keturunan dari Lembu Mirunda dari Majapahit (Brawijaya)<sup>14</sup>. Kemudian beliau belajar mengaji di kedaton Giri di bawah asuhan Sunan Giri IV (Sunan Prapen). Selanjutnya setelah beliau menyelesaikan belajar mengaji di kedaton Giri beliau lalu kembali ke tempat asalnya dan menjadi Raja Blambangan<sup>15</sup>. Masa pemerintahannya berlangsung dari tahun 1633 sampai dengan tahun 1639, selama masa pemerintahannya Tawang Alun I sering mendapat serangan dari Mataram dan Belanda yang mengakibatkan kedatonnya hancur pada tahun 1639. Sunan Tawang Alun I melarikan diri ke arah barat menuju Brondong untuk meminta perlindungan pada anaknya yaitu Ki Lanang Dhangiran (Sunan Brondong) yang kemudian oleh Ki Lanang diberi tempat di desa kuno yang bernama Candi Pari (kini menjadi Desa Balun) sebagai tempat persembunyian untuk menghindari kejaran musuh. Ketika berada di tempat persembunyiannya Sunan Tawang Alun I aktif mengajar ngaji dan menyiarkan agama Islam di tempat tersebut, hal tersebut ia lakukan hingga akhir hayatnya. Sunan Tawang Alun I wafat pada tahun 1654 pada usia 80 tahun beliau di kenal sebagai ulama dengan sebutan Raden Alun atau Raden Sin Arih. Menurut bapak Titis pada sekitar tahun 1965 pemeluk agama muslim di desa balun sekitar 752 KK namun sebagian besar merupakan Islam dengan kepercayaan Kejawan, tempat-tempat ibadah di desa balun yang merupakan mushola jarang digunakan dan hanya menjadi tempat-tempat Jagongan (nongkrong) oleh pemuda-pemuda pada waktu itu<sup>16</sup>. Perkembangan dan hubungan keharmonisan dengan agama lain dimulai ketika tahun 1996 pasca peristiwa G30S PKI. Pada waktu itu banyak yang menyelamatkan diri agar tidak di culik dan dibunuh karena takut di cap PKI. Masyarakat yang menyelamatkan diri kemudian masuk Islam dengan tanda gambar Masyumi atau Nahdatul Ulama selamat.<sup>17</sup>

Pasca peristiwa G30S PKI warga balun yang mayoritas pemeluk agama Islam mendirikan masjid. Sebagai tokoh utama yang melakukan pembangunan masjid H. Abdul Goni, menggunakan sebagian hartanya digunakan untuk membangun masjid dan keluarganya sampai sekarang masih melanjutkan pembangunan yang dilakukan bapaknya antara lain membangun pondok pesantren, madrasah dimana pembangunan ini ia biayai sendiri. Namun pada saat itu masjid masih berukuran kecil

<sup>12</sup> 18. G. Budi Subanar, Menuju Gereja Mandiri: Sejarah Keuskupan Agung Semarang di Bawah Dua Uskup (1940-1981), Hlm.150.

<sup>13</sup> Wawancara, Bapak Naskan *ibid*.

<sup>14</sup> Chambali, A. tt. Sejarah Mbah Alun (*Bedande Sakte Bhreau Sin Arih*). Leaflet. Kepala Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan.

<sup>15</sup> Sukari, Noor Sulistyio Budi, Th. Esti Wuryansari. Toleransi Dan Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Keluarga: Studi kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, hlm.15.

<sup>16</sup> Wawancara, Bapak Nasekan, Mantan Ketua Majelis Jemaat GKJW Papanthan Balun., tanggal 30 Oktober 2020

<sup>17</sup> Wawancara, Bapak Titis, Tokoh Pemeluk Agama Islam, tanggal 30 Oktober 2020

sehingga tidak dapat memuat banyak jemaah ketika melakukan ibadah bersama-sama seperti sholat Idul Fitri, sehingga di lakukan pembangunan masjid yang lebih besar pada masa pemerintahan kepala desa bapak Bathi dengan diberikan tanah kas desa dan masjid di beri nama Miftahul Huda. Masuknya agama Kristen dan Hindu di desa balun tidak menjadikan pemeluk agama Islam di desa balun terjadi konflik dengan pemeluk agama lain, justru masyarakat muslim menerima baik dan proses kerukunan terjadi. Jumlah pemeluk agama Islam menjadi mayoritas di Desa Balun hal ini di karena kan agama Islam sendiri sudah sejak lama berada di Desa Balun, sejak masuknya agama Kristen dan Hindu jumlah pemeluk agama Islam berubah-ubah tercatat dalam data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan jumlah pemeluk agama Islam di Desa Balun pada tahun 1987 sebanyak 3.000 orang, tahun 1996 menjadi 2.849 orang dan pada tahun 1998 mengalami kenaikan menjadi 3.164 orang.

## 2. Masuk Dan Berkembangnya Agama Kristen di Desa Balun

Agama Kristen pertama kali masuk di desa balun dipelopori oleh bapak Bathi yang merupakan tokoh kepala desa pada tahun 1967 yang menggantikan kepala desa sebelumnya karena hilang dalam peristiwa G30 S. Bapak Bathi sebelum menjadi kepala desa balun merupakan anggota TNI Kodim 0812 Lamongan, bapak Bathi lahir di Lamongan pada tanggal 6 juni 1924. Bapak Bathi menjadi kepala desa balun karena terjadi kekosongan pemerintahan di desa tersebut. Pada tahun 1967 di lakukan pembaptisan kepada pak Bathi dan beberapa warga desa balun yang berjumlah 92 Orang<sup>18</sup>. Di sinilah Kristen mulai di perkenalkan di desa balun oleh bapak Bathi dan di bantu oleh bapak Yohanes Latufaerisa juga bapak Darius. Agama Kristen di desa balun terus berkembang pada tahun 1967-1968 menurut penuturan bapak Naskan yang pada saat itu merupakan kerabat bapak Bathi, masyarakat memilih agama Kristen di dasari dengan adanya tempat pemandian di tempat mbah Bathi yang bilamana orang tersebut mandi di tempat tersebut dapat menyembuhkan penyakit yang di deritanya. Umat beragama Kristen di desa balun melaksanakan peribadatan di rumah bapak Bathi, lalu pada tahun 1968-1971 di bangunlah gereja secara gotong royong oleh masyarakat Desa Balun, karena bertambahnya jumlah pemeluk agama Kristen di desa balun di bangunlah gereja lebih besar agar dapat menampung jemaah gereja desa balu pada tahun 1975 dan baru selesai total pada tahun 1996 yang di gunakan hingga saat ini.

Perkembangan agama Kristen di Desa Balun Tumbuh tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh pemuka agama yang berperan dalam upaya memperkenalkan agama Kristen di wilayah desa balun juga adanya gerakan warga yang peduli terkait dengan sesama umat manusia, kepedulian ini bisa di lihat pada aktivitas pemeluk agama Kristen yang peduli terhadap perkembangan gereja terkait dengan perkembangan teologi, daya dan dana. Dalam perkembangan teologi bisa di lihat dari kebiasaan warga di

luar Kristen dan memberikan persembahan berupa kambing dan uang yang biasanya di tunjukan untuk keluarganya yang beragama Kristen dan sudah meninggal. Sedangkan gerakan warga yang berhubungan dengan daya meliputi kepedulian terhadap warga miskin, warga yang sedang sakit dengan mengadakan kunjungan. Contoh ketiga yang berhubungan dengan dana misalnya kepedulian terhadap pembangunan gereja serta inventarisnya. berkembangnya agama Kristen di Desa Balun tidak hanya di pengaruhi oleh peranan tokoh-tokoh disana , peraturan/kebijakan pemerintah yang di keluarkan pada tahun 1967 mengakibatkan gelombang perpindahan agama secara besar-besaran di indonesia hal ini juga berdampak di desa balun dan terjadi baptis masal di tahun 1968, baptis masal tersebut di ikuti sekitar 200 orang, pada akhir 1970 sekitar 3000 orang sudah di baptis dan masuk ke agama Kristen.<sup>19</sup> Jumlah pemeluk agama Kristen berubah-ubah secara fluktuatif setiap tahunnya, menurut data Badan Pusat Statistik Kecamatan Turi pada tahun 1987 pemeluk agama Kristen di desa balun turun menjadi 830 orang tahun 1994 menjadi 1.050 orang dan pada tahun 1998 menjadi 1.002 orang.

## 3. Masuk Dan Berkembangnya Agama Hindu di Desa Balun

Agama Hindu di Desa Balun masuk pada tahun 1967 pasca peristiwa G30s PKI, sebelum masuknya agama Kristen dan Hindu pada mulanya masyarakat balun banyak yang memeluk agama Islam dan kepercayaan Kejawan (Sapto Darmo). Pada tahun 1966 pemerintah orde baru mengharuskan setiap warga negara indonesia untuk mengaku keberadaan tuhan dan memeluk salah satu agama, hal tersebut dilakukan agar masyarakat indonesia tidak menjadi penganut ateisme yang pada waktu itu di anggap berhubungan dengan PKI , karena dasar tersebut bapak Bathi selaku kepala desa balun pada waktu itu menghimbau warganya yang masih menganut kepercayaan Kejawan ( Sapto Dharmo) untuk memeluk agama yang pada saat itu diakui pemerintah ada lima agama yang di akui pemerintah saat itu yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha. Menurut bapak Tadi<sup>20</sup> masyarakat desa balun yang menganut ajaran Kejawan pada akhirnya mengambil keputusan untuk memeluk agama yang di akui pemerintah pada waktu itu. Pada awalnya peraturan terebut di realisasikan sebagian penganut agama Kejawan di Desa Balun masih berusaha mencari agama mana yang dalam pelaksanaan dan konsep ibadahnya menyerupai atau mirip dengan kepercayaan yang mereka anut.

Pada awal masuknya agama Hindu di desa balun jumlah pemeluk agama Hindu menurut data Badan Statistik Kecamatan Turi hanya berjumlah 6 orang pada tahun 1971, pada tahun 1980 dengan jumlah pemeluk 150, tahun 1987 sejumlah 253 orang, tahun 1996 sejumlah 420 orang, jumlah pemeluk agama Hindu di desa balun mengalami penurunan pada akhir tahun 1998 yang hanya berjumlah 241 orang. Fluktuatif nya jumlah pemeluk agama Hindu di desa balun menurut penuturan bapak

<sup>18</sup>Pdt. Jatmiko, Sejarah Gereja Balun, Hlm.9.

<sup>19</sup> Wawancara, Bapak Nasekan, *Ibid*.

<sup>20</sup> Wawancara, Bapak Tadi, Tanggal 25 Oktober 2020, Pemangku Agama Hindu.

Tadi<sup>21</sup> di sebabkan oleh jumlah kematian, perpindahan penduduk dan faktor perkawinan. Pada awal berdirinya komunitas Hindu di desa balun belum mempunyai tempat ibadah, pada waktu itu umat Hindu di Desa Balun melakukan aktivitas ke agamawan dengan cara berkeliling dari rumah ke rumah. Melihat adanya kondisi demikian bapak Bathi selaku kepala desa balun menawarkan sebidang tanah yang berlokasi di belakang SD tanah tersebut dulu statusnya merupakan tanah negara (TN) atau kas desa. Pada tahun 1987 sanggar yang di gunakan mengalami perkembangan dan mulai di bangun sebuah pura juga bangunan-bangunan lainnya. Pada tahun 1996 pembangunan pura telah selesai dan di resmikan oleh bupati Lamongan yang sewaktu itu di jabat oleh muhammad Farid. pura tersebut di beri nama “Pura Sweta Maha Suci “

#### D. Peran Pemerintah Pada Masa Orde Baru

Dalam Upaya mewujudkan dan menjaga kerukunan di suatu daerah diperlukan adanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri, di Desa Balun proses terwujudnya sebuah keharmonisan tidak terlepas dari upaya-upaya pemerintah dalam menjaga kerukunan sebagai wujud implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.

##### 1. Transformasi Religi Pasca Peristiwa G30S PKI

Peristiwa G30s PKI membawa polemik dan masalah tersendiri pada masyarakat Indonesia, Dalam hal urusan beragama, Salah satu tindakan tegas yang dilakukan pemerintah pada masa itu adalah mengenai masalah kebebasan beragama. Dengan dikeluarkannya ketetapan Tap MPRS No. XXVII/MPRS/1966<sup>22</sup>. Indonesia mengalami peristiwa perpindahan agama secara besar-besaran karena kebijakan pemerintah Orde Baru melalui angkatan darat pada waktu itu yang mengharuskan setiap warga indonesia harus memeluk agama resmi yang di akui oleh pemerintah.<sup>23</sup> Peraturan ini tersampaikan ke Desa Balun melihat bapak Bathi yang sewaktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Balun mengumumkan kepada warga yang masih memeluk agama Kepercayaan Kejawan agar segera memeluk agama resmi yang di akui oleh pemerintah. Hal ini berawal dari banyaknya orang yang di anggap simpatisan PKI dan Ormas-ormasnya dimana PKI pada waktu itu di anggap tidak beragama atau ateis, kebijakan yang di lakukan pemerintah pada saat itu mengakibatkan terjadinya gelombang perpindahan ke agama formal dimana hal ini di lakukan masyarakat pada saat itu sebagai pelindung untuk menjaga kelangsungan hidupnya.

Perpindahan sebagian agama Islam abangan ke agama formal lain justru menjadi sebuah isu yang mengganggu hubungan antara Islam dan Kristen karena di anggap tindakan gereja dalam mengambil keuntungan di situasi politik yang sedang terjadi, kelompok muslim menganggap bahwa hal tersebut merupakan misi gereja

pada waktu itu untuk menarik orang untuk memeluk agama Kristen, akibatnya terjadi ketegangan antara dua belah pihak Islam dan Kristen. Ketegangan yang terjadi pada tahun 1969 antara umat kristen dan umat Islam tidak berdampak bagi kehidupan masyarakat yang ada di Desa Balun, hal ini dikarenakan sikap toleransi yang tinggi dari masyarakat selain itu hubungan kekeluargaan dalam sebuah desa menjadi alasan mengapa konflik dan gesekan antar umat beragama tidak pernah terjadi di desa balun, peran tokoh, pemerintah desa dan pemerintah pusat juga turut ikut serta menjaga kerukunan di Desa Balun

##### 2. Upaya Pemerintah Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama

Pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dengan menyelenggarakan Musyawarah Antar Agama pada tanggal 30 November 1969 bertempat di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta yang dihadiri pemuka-pemuka agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Upaya ini dilakukan pemerintah guna mengatasi ketegangan dalam kehidupan beragama, agar tercipta kerukunan demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

. Pemerintah Desa Balun dalam hal ini berperan dalam menjaga kerukunan dengan di adakan nya kesepakatan oleh seluruh tokoh agama dan warga Desa Balun untuk selalu menjaga dan mengembangkan kerukunan atau toleransi antar masyarakat beragama di Desa Balun pada 17 Juni 1998. Program-Program pemerintah pusat pada waktu itu seperti penerapan P4 juga masuk ke Desa Balun,<sup>24</sup> menurut penuturan bapak Titis Program-Program pemerintah pada waktu itu di sambut dengan baik misalnya penerapan P4 dimana bapak Titis dan rekan-reka nya menjadi pelaksana program pemerintah waktu itu,<sup>25</sup> Desa Balun menjadi salah satu contoh program pemerintah saat itu dan melibatkan masyarakat desa balun untuk menjaga nilai-nilai pancasila. Penerapan Program- Program tersebut menjadikan Desa Balun menjadi lebih kuat dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama nya di lihat dari tidak adanya permasalahan atau konflik terkait agama dari awal masuknya agama Kristen dan Hindu hingga sampai saat ini.

#### PENUTUP

##### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian harmoni masyarakat Desa Balun pasca transformasi religi dampak peristiwa G30S PKI pada masa Orde Baru dapat di simpulkan bahwa komposisi demografi, mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam sebanyak 65% agama Kristen sebanyak 25% dan agama Hindu sebanyak 10% dari rata-rata total penduduk Desa Balun pada masa Orde Baru. Jumlah pemeluk agama di Desa Balun mengalami perubahan tiap tahun di karena kan faktor perkawinan, kematian dan perpindahan penduduk.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> G. Budi Subanar, *Di-PKI-Kan Tragedi Kaum Nasrani di Indonesia Timur*. Yogyakarta: Syarikat, 2005. Hal. vii.

<sup>23</sup> Jan S. Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), Hlm. 382.

<sup>24</sup> Wawancara, Bapak Titis, *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

Terwujudnya harmonisasi antar umat beragama di Desa Balun merupakan peran dari tokoh, pemerintah serta masyarakat balun itu sendiri yang di dalamnya hubungan kekeluargaan antar masyarakatnya menjadi faktor penting terjadinya kerukunan tersebut. Masuknya agama Kristen dan Hindu pada tahun 1966 pasca peristiwa G30SPKI dimana kekacauan yang terjadi di desa balun terdengar oleh bapak Bathi yang pada waktu itu menjabat sebagai anggota TNI di Malang dan mengharuskan bapak Bathi untuk pulang ke desa balun demi menjamin situasi yang ada di desa balun. Bapak Bathi merupakan tokoh yang menyebarkan agama Kristen di Desa Balun dan menjadi kepala Desa Balun pada tahun 1997 mengisi kekosongan jabatan perangkat desa pasca peristiwa G30SPKI, Pada tahun yang sama agama Hindu juga masuk ke Desa Balun yang pada awal prosesnya merupakan masyarakat pemeluk agama kepercayaan seperti (Sapto Dharmo).

Peran pemerintah terkait proses terwujudnya harmonisasi di Desa Balun diawali dengan munculnya peraturan terkait agama resmi yang di akui pemerintah, peraturan ini muncul pasca peristiwa G30s PKI pada tahun 1965 yang dimana PKI pada waktu itu di anggap tidak beragama dan identik dengan ateisme yang mengakibatkan munculnya peraturan pemerintah yang mengharuskan setiap warga Indonesia harus segera memeluk agama resmi yang di akui pemerintah meliputi Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Adanya peraturan tersebut mengakibatkan gelombang transformasi agama secara besar-besaran di seluruh Indonesia dan berdampak pada Desa Balun, yang dalam proses masuknya agama kristen dan hindu merupakan himbauan dan bapak Bathi kepada masyarakat Desa Balun khususnya yang masih memeluk agama kepercayaan kejawaen (Sapto Dharmo) untuk segera memeluk agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia melakukan upaya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dengan menyelenggarakan Musyawarah Antar Agama pada tanggal 30 November 1969 bertempat di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta. Upaya ini dilakukan pemerintah guna mengatasi ketegangan dalam kehidupan beragama, agar tercipta kerukunan demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu Pemerintah Desa Balun mengadakan kesepakatan oleh seluruh tokoh agama dan warga Desa Balun untuk selalu menjaga kerukunan antar masyarakat beragama di Desa Balun pada 17 Juni 1998. Proses penerapan program-program tersebut dapat menjaga kerukunan beragama Desa Balun yang dibuktikan dengan tidak adanya permasalahan terkait kerukunan umat beragama.

## 2. Saran

Desa Balun sebagai desa yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi agar dapat menjadi contoh bagi kehidupan masyarakat saat ini, untuk mencegah terjadinya kembali kasus-kasus intoleransi yang kerap terjadi. Keharmonisan Desa Balun agar dapat menjadi cerminan dimana sejatinya kerukunan antar umat beragama dapat di raih dengan adanya sinergi antara masyarakat dengan pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip

BPS tahun 1987, Sumber Statistik Kecamatan Turi 1987.  
BPS tahun 1996, Sumber Statistik Kecamatan Turi 1996.  
BPS tahun 1998, Sumber Statistik Kabupaten Lamongan 1998.  
Sumber Data Monografi Desa Balun 1998

### Buku

Kuntowijoyo. 2000. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang Budaya.  
Kasdi, Aminuddin. 2011. Memahami Sejarah. Surabaya:UNESA University Press.  
Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Jakarta: Depag RI, 2003  
Ahmad, Nur. Pluralitas Agama; Kerukunan dan Keragaman. Jakarta: Kompas, 2001.  
Sukari, Noor Sulisty Budi, Th. Esti Wuryansari. Toleransi Dan Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Keluarga: Studi kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, 2018.  
G. Budi Subanar, *Di-PKI-Kan Tragedi Kaum Nasrani di Indonesia Timur*. Yogyakarta: Syarikat, 2005.  
Jan S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.  
Abieno, J.L.CH. 2001. Sekitar Katekese Gerejawi: Pedoman Guru. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

### Jurnal

Rosyid, Moh. *Mewujudkan Pendidikan Toleransi antar-Umat Beragama di Kudus: Belajar dari Konflik Tolikara Papua 1 Syawal 1436 H / 2015 M*. Jurnal Pendidikan Islam, Quality. Vol. 3. No. 2. Desember 2015  
Asmaroini, A. P. Menjaga Eksistensi Pancasila Dan Penerapannya Bagi Masyarakat di Era Globalisasi. JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 1(2), 50-64. (2017).  
Nur chayati ningsih, d. E. W. I. "eksistensi nilai-nilai pancasila di desa balun kecamatan turi kabupaten lamongan." *kajian moral dan kewarganegaraan* 2.4 (2016).

### Website

Sejarah Balun

<http://id.wikipedia.org/wiki/Balun,Turi,Lamongan>  
Pada 15 Mei 2020 pukul 20.00 WIB

Profil Desa Balun

<http://lamongankab.go.id/instansi/turi/16/profil-des/> diakses pada 15 Mei 2020 pukul 20.00 WIB

### Wawancara

Wawancara dengan bapak Nasekan Mantan Ketua Majelis Jemaat GKJW Pepanthen Balun. Tanggal 25 Oktober 2020 di kediaman narasumber.

Wawancara dengan bapak Titis selaku tokoh umat agama Islam Desa Balun tanggal 30 Oktober 2020 di kediaman narasumber.

Wawancara dengan bapak Tadi selaku pemangku adat Hindu di Desa Balun tanggal 25 Oktober 2020 di kediaman narasumber

